

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang ketertiban umum di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep, khususnya terkait dengan pedagang kaki lima (PKL) yang belum tertib dalam mematuhi peraturan tersebut. Penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Samudra Wibawa (1998), Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi Perda Nomor 3 Tahun 2002 di Kantor Satpol PP. Berdasarkan teori Samudra Wibawa, hasilnya menunjukkan bahwa perumusan kebijakan melibatkan berbagai pihak melalui PROLEGDA, tetapi terkendala oleh kesenjangan institusional karena Satpol PP baru terbentuk pada 2006. Implementasi kebijakan memberikan dampak positif pada ekonomi PKL meskipun mengalami kendala koordinasi antar instansi. Meskipun berhasil mengurangi pengangguran, kebijakan ini menghadapi tantangan seperti kurangnya fasilitas, masalah sampah, dan kemacetan. Efektivitas kebijakan belum optimal karena ketidaksesuaian regulasi dan keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan revisi kebijakan dan peningkatan kerjasama lintas sektor. Kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan Perda ini disusun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, namun menghadapi tantangan koordinasi dalam implementasinya. Meskipun berhasil meningkatkan ekonomi dan keteraturan PKL, kebijakan ini juga menimbulkan masalah seperti kurangnya fasilitas dan kemacetan yang perlu diatasi melalui evaluasi dan revisi kebijakan yang lebih efektif. Saran dari peneliti meliputi perlunya revisi rutin kebijakan oleh DPRD berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, dukungan Diskoperindag dalam pengembangan infrastruktur dan dana untuk mengurangi dampak negatif, pelatihan bagi PKL untuk meningkatkan keterampilan dalam berusaha, serta evaluasi rutin oleh OPD terkait seperti Diskoperindag, Dishub, Satlantas, DLH, Satpol PP, dan PUTR terhadap implementasi kebijakan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Penertiban PKL, Perda Nomor 3 Tahun 2002

## **ABSTRACT**

*This research aims to evaluate the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning public order on Jalan Diponegoro, Sumenep Regency, especially in relation to street vendors (PKL) who have not been orderly in complying with these regulations. The research uses policy evaluation theory from Samudra Wibawa (1998). This research uses a qualitative descriptive approach to evaluate Regional Regulation Number 3 of 2002 at the Satpol PP Office. Based on Samudra Wibawa's theory, the results show that policy formulation involves various parties through PROLEGDA, but is hampered by institutional gaps because Satpol PP was only formed in 2006. Policy implementation has had a positive impact on the street vendor economy despite experiencing coordination problems between agencies. Although successful in reducing unemployment, this policy faces challenges such as lack of facilities, waste problems and traffic jams. The effectiveness of policies is not yet optimal due to regulatory inconsistencies and budget limitations, so policy revisions and increased cross-sector collaboration are needed. The conclusions that researchers can convey. This regional regulation was drafted through collaboration between local government, related agencies and the community, but faced coordination challenges in its implementation. Although successful in improving the economy and orderliness of street vendors, this policy also creates problems such as lack of facilities and traffic jams which need to be overcome through evaluation and revision of more effective policies. Suggestions from researchers include the need for regular policy revisions by the DPRD based on input from stakeholders, support from the Diskoperindag in developing infrastructure and funds to reduce negative impacts, training for street vendors to improve their business skills, as well as regular evaluations by related OPDs such as the Diskoperindag, Dishub, Traffic Police, DLH, Satpol PP, and PUTR regarding policy implementation.*

**Keywords:** Policy Evaluation, Controlling Street Vendors, Regional Regulation Number 3 of 2002